**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, EKSTENSIFIKASI PAJAK, INTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG BERDAMPAK PADA PENERIMAAN PAJAK**

**PADA DJP KANWIL JAWA BARAT II**

**Kosasih**

## Universitas Pasundan Bandung, Indonesia

## email: kosasih@staff.unsika.ac.id

## Abstrak

Tujuan melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas adalah untuk mengetahui gambaran tentang penomena yang didukung oleh bukti empiris tentang belum tercapainya realisasi penerimaan pajak di DJP Kanwil Jawa Barat II, sedangkan peluang untuk mencapai realisasi target masih memungkinkan karena wilayah kerja DJP Kanwil Jawa Barat II meliputi Kawasan Indutri yang besar seperti di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kotamadya Bekasi, Kabupaten Cirebon serta Kabupaten dan Kotamadya yang lainnya. Berdasarkan penomena tersebut, tertarik untuk diteliti akar penyebab permasalahan utamanya dengan pembatasan pada faktor Pengaruh *Self Assessment System*, Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada Penerimaan Pajak Pada DJP Kanwil Jawa Barat II.

Metodologi penelitian ini menggunakan metode *deskriptif verifikatif* dengan menggunakan *Path Analysis*, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, baik secara parsial maupun simultan melalui sarana variabel intervening (mediator).

Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota populasi yang telah ditetapkan sebelumnya, sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan pada DJP Kanwil Jawa Barat II yang pernah mengikuti sosialisasi/penyuluhan pajak dan pernah diperiksa pajak.

Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan, gambaran deskriptif dinyatakan berada pada rata-rata baik, sedangkan hasil analisis verifikatif menunjukan secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung *Self Assessment System*, Ektensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang berdampak pada Penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II. Adapun hubungan asosiatif yang paling dominan adalah antara Intensifikasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : *Self Assessment System*, Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Badan, Penerimaan Pajak.

## Abstract

The purpose of conducting research with the title above is to find a description of the phenomenon supported by empirical evidence about the unfulfilled tax revenue realization at the DJP Kanwil Jawa Barat II, while the opportunity to achieve the target realization is still possible because the regional work area of DJP Kanwil Jawa Barat II covers the Regions Large industry like in Karawang Regency, Bekasi Regency, Bekasi Municipality, Cirebon Regency and other Regencies and Municipalities. Based on this phenomenon, it is interested to study the root causes of the main problems with restrictions on the factors of the Effect of Self Assessment System, Tax Extensification, Tax Intensification, on the Compliance of Taxpayers that

have an impact on Tax Revenue in the DJP Kanwil Jawa Barat II.

This research methodology uses descriptive verification method using Path Analysis, to find out how much influence exogenous variables have on endogenous variables, either partially or simultaneously through intervening variable means (mediators).

The sample in this study were all predetermined population members, the sample used as respondents in this study were Corporate Taxpayers at the DJP Kanwil Jawa Barat II who had participated in tax socialization / counseling and had been examined tax.

The results of the study showed that overall, the descriptive picture was stated to be on a good average, while the results of the verification analysis showed that partially or simultaneously there were positive and significant influences both directly and indirectly the Self-Assessment System, Tax Extensification, Tax Intensification, and Taxpayer Compliance. Agency that impacts tax revenues in DJP Kanwil Jawa Barat II. The most dominant associative relationship is between Tax Intensification with Taxpayer Compliance.

Keywords :S*elf-Assessment System, Tax Extensification, Tax Intensification, Obligatory Compliance, Tax Receipts*

## PENDAHULUAN

Pada postur APBN 2018, pemerintah mematok pendapatan Negara sebesar Rp 1.894,7 triliun, naik cukup signifikan dibandingkan dengan APBN 2017 sebesar Rp 1.750,3 triliun ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.618,1 triliun, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 275,4 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,2 triliun. (Media Keuangan, Januari 2018, hal 15)

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan ialah: Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Penerimaan pajak ialah: Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. (Hutagaol (2007:325)).

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak Pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment* . Sistem *self assessment* adalah “Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang”. (Aristanti Widyaningsih (2013:15))

Dalam rangka realisasi pencapaian target penerimaan pajak dan menguji kepatuhan, serta pelayanan terhadap Wajib Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan pecarian potensi Wajib Pajak baru untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan melakukan Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang sudah ada melalui pelaksana terdepan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. Fungsi kedua adalah fungsi mengatur (*regulerend*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan pencapaian tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. (Siti Resmi, 2003 : 2-3)

Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar (Subjek Pajak) serta perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang antara lain berupa kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komosaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Kegiatan intensifikasi pajak ini dapat diwujudkan dengan dengan peningkatan tarif pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya menggunakan kekuatan hukum seperti penerbitan SPT (Surat Pemberitahuan), pemeriksaan, penyidikan, penagihan aktif pemberian sanksi dan denda serta melalui pengadilan atas tindakan pidana karena lalai membayar pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan (*tax administration reform*), pembinaan kepada wajib pajak dan pengawasan administratif (M Arsyad 2013:5).

Kepatuhan pajak Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.” (Norman D. Nowal dalan Siti Kurnia Rahayu (2013:138))

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan analisis kuantitatif.

Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai vaiabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Burhan Bungin (2013:44).

Sedangkan analisis verifikatif dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh parsial *self assessment system,* ekstensifikasi, intensifikasi, terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta pengaruh simultan *self assessment system,* ekstensifikasi, intensifikasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya pada penerimaan pajak.

Menurut Sugiyono (2012:38) menjelaskan bahwa variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Pengaruh *self assessment system,* ekstensifikasi, dan intensifikasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya pada penerimaan pajak”, maka penulis melakukan penelitian dan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Variabel Eksogen (X)

Variabel eksogen yang dalam penelitian ini yaitu *self assessment system,* ekstensifikasi, dan intensifikasi.

1. Variabel *Endogen* (Z)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel (Z) adalah penerimaan pajak.

1. Variabel *Intervening* (Y)

Menurut Sugiyono (2012:39) variabel *intervening* adalah:

“Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur”. Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel (Y) adalah kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam hal ini variabel-variabel penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

* + - 1. *Self Assessment System* (X1)
      2. Ekstensifikasi Pajak (X2)
      3. Intensifikasi Pajak (X3)
      4. Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)
      5. Penerimaan Pajak (Z)

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer dan skunder. Data primer bersumber dari survey ke lapangan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data skunder bersumber dari dokumentasi atau laporan-laporan yang berkaitan dengan objek yang diteliti dari KPP Pratama dibawah naungan DJP Kanwil II Jawa Barat. Skala yang digunakan oleh peneliti adalah Skala *Likert Summated’s Rating atau Likert* 5 poin.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan Terdaftar Wajib SPT (wajib pajak yang mempunyai kewajiban melaporkan Surat Pembetahuan pajak) di DJP Kanwil II Jawa Barat berjumlah 50.593 wajib pajak yang tersebar di 11 (sebelas) Kator Pelayanan Pajak pada DJP Kanwil Jawa Barat II dengan jumlah sampel 258 melalui uji Validitas, Reliabilitas dan Normalitas.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan Metode statistika dengan analisis jalur digunakan untuk mengukur pola hubungan yang mengisyaratkan besarnya pengaruh beberapa variabel penyebab (eksogen) terhadap variabel akibat (endogen).

Hasil dan Pembahasan

Tabel 4.23

Koefisien Korelasi antar Variabel

**Correlations**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Self Assessment System | Ekstensifikasi Pajak | Intensifikasi Pajak |
| Self Assessment System | Pearson Correlation | 1 | .613\*\* | .486\*\* |
|  | Sig. (2-tailed) |  | .000 | .000 |
|  | N | 258 | 258 | 258 |
| Ekstensifikasi Pajak | Pearson Correlation | .613\*\* | 1 | .553\*\* |
|  | Sig. (2-tailed) | .000 |  | .000 |
|  | N | 258 | 258 | 258 |
| Intensifikasi Pajak | Pearson Correlation | .486\*\* | .553\*\* | 1 |
|  | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 |  |
|  | N | 258 | 258 | 258 |

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka hubungan yang positif antara *Self Assessment System*, Ektensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak dalam penelitian. Untuk jelasnya besaran koefisien. Dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut:

X1

X2

0.596

0.346



0.613

0.486

0.553

Intensifikasi Pajak

Ekstensifikasi Pajak

*Self Assessment System*

Gambar 4.3

X3

0.332

Hubungan antara *Self Assessment System* , Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak.

**Koefisien Jalur.**

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 19 diperoleh besaran koefisien jalur seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.25

Nilai Koefisien Jalur *Self Assessment System*, Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

**Coefficientsa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 14.018 | 2.240 |  | 6.257 | .000 |
|  | Self Assessment System | .272 | .046 | .295 | 5.913 | .000 |
|  | Ekstensifikasi Pajak | .289 | .046 | .329 | 6.287 | .000 |
|  | Intensifikasi Pajak | .135 | .020 | .318 | 6.723 | .000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh besaran koefisien jalur antar variabel penelitian yang dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

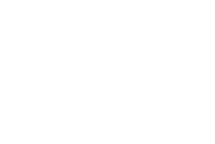
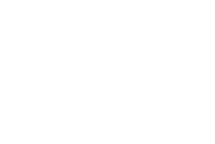
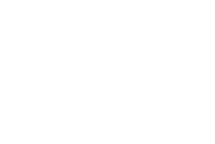
Hasil analisis jalur *Self Assessment System*, Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, dapat dijelas pada gambar di bawah ini :

X1

0.596

0.241

= 0.659



ɛ1 0.376

0.613

0.295

0.486

0.329

0.553

0.318

Ekstensifikasi Pajak

Intensifikasi Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

*Self Assessment System*

Gambar 4.4

X3

0.332

0.287

Pengaruh *Self Assessment System*, Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka diperoleh persamaan jalur sebagai berikut:

Y = 0,295 X1 + 0,329 X2 + 0,318 X3 + ε1

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan X1 = *Self Assessment System*

X2 = Ekstensifikasi Pajak X3 = Intensifikasi Pajak

Besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat baik pengaruh langsung (*Direct Effect*) maupun pengaruh tidak langsung (*Indirect Effect)* dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.27

Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung

*Self Assessment System*, Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Pengaruh Langsung ke**  **(Kepatuhan Wajib Pajak Badan)** | **Pengaruh Tidak Langsung** | | | **Total Pengaruh** |
| (*Self*  *Assessment System)* | (Ekstensifikasi Pajak) | (Intensifikasi Pajak) |
| (*Self Assessment System)* | 0,0870 | - | 0,0595 | 0,0456 | **0,1921** |
| (Ekstensifikasi Pajak) | 0,1082 | 0,0595 | - | 0,0579 | **0,2256** |
| (Intensifikasi Pajak) | 0,1011 | 0,0456 | 0,0579 | - | **0,2046** |
| **Total Pengaruh** | | | |  | **0,6223** |

Sumber : Hasil perhitungan, 2019

Hasil analisis jalur Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak, dapat dijelas pada gambar di bawah ini :

0.361



ɛ3 = 0.348

0.807

Y

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Z

Penerimaan Pajak

R2 = 65,2

Gambar 4.5

R2=0.408

0.639

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil perhitungan Koefisien determinasi (R kuadrat) yang dinyatakan dalam persentase mengambarkan besarnya Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam menentukan variasi Penerimaan Pajak (Z) adalah sebesar 65,2 %.

Pengaruh secara simultan *Self Assessment System***,** Ekstensifikasi Pajak**,** Intensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan , maka dapat dilihat dari hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 4.31

Uji Simultan *Self Assessment System*, Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

**ANOVAb**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression  Residual | 10618.835  6394.777 | 3  254 | 3539.612  25.176 | 140.593 | .000a |
| Total | 17013.612 | 257 |  |

1. Predictors: (Constant), Intensifikasi Pajak, Self Assessment System, Ekstensifikasi Pajak
2. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar 140,593 dimana kriteria penolakan H0 jika Fhitung lebih besar daripada Ftabel atau F0> Ftabel, dengan derajat bebas V1 = 3 dan V2 = 258-3-1 dan tingkat kepercayaan 95%, maka dari tabel distribusi F didapat nilai Ftabel = 2,642. Karena 140,593 lebih besar dari 2,642, maka H0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan secara linear antara *Self Assessment System,* Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, atau dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan (bersama-sama) antara *Self Assessment System,* Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pengaruh secara simultan variabel - variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak. Maka dapat dilihat dari hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 4.32

Uji Simultan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak

**ANOVAb**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 13818.707 | 1 | 13818.707 | 479.274 | .000a |
| Residual Total | 7381.138  21199.845 | 256  257 | 28.833 |  |  |

* 1. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
  2. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Z)

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar 479,274 dimana kriteria penolakan H0 jika Fhitung lebih besar daripada Ftabel atau F0> Ftabel, dengan derajat bebas V1 = 1 dan V2 = 258-1-1 dan tingkat kepercayaan 95%, maka dari tabel distribusi F didapat nilai Ftabel = 3,89. Karena 479,274 lebih besar dari 3,89, maka H0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan secara linear antara Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak

## SIMPULAN

1. *Self Assessment System* pada DJP Kanwil Jawa Barat II dengan kategori jawaban berada pada rata-rata setuju, artinya Wajib Pajak Badan menilai pelaksanaan *Self Assessment System* pada DJP Kanwil Jawa Barat II sudah Baik.
2. Ektensifikasi Pajak pada DJP Kanwil Jawa Barat II dengan kategori jawaban berada pada rata-rata setuju, artinya pelaksanaan Ektensifikasi Pajak di DJP Kanwil Jabar II sudah baik.
3. Intensifikasi Pajak pada DJP Kanwil Jawa Barat II dengan kategori jawaban berada pada rata-rata kriteria setuju, artinya Wajib Pajak menilai pelaksanaan Intensifikasi Pajak pada DJP Kanwil Jawa Barat II sudah baik.
4. Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada DJP Kanwil Jawa Barat II dengan kategori jawaban berada pada rata-rata kriteria Setuju, artinya responden menilai Wajib Pajak Badan pada Kanwil DJP Jawa Barat II sudah patuh.
5. Penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II masih terdapat hambatan, wajib Pajak Badan menyampaikan tanggapan dengan kategori pada rata-rata kriteria Setuju, artinya Wajib Pajak Badan menilai masih besar hambatan dalam realisasi target penerimaan pajak.
6. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan baik secara langsung maupun tidak langsung *Self Assessment System*, Ektensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang berdampak pada Penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II. Adapun hubungan asosiatif yang paling dominan adalah antara Intensifikasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
7. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Amin Syukron, 2013.. **Pengantar Manajemen Industri**, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Abdul Rahman, 2010. **Panduan Pelaksana “Administrasi Perpajakan” Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan**. Nuansa Cedekia, Bandung.

Bambang Suharjo, 2013. **Statistika Terapan**, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Chairil Anwar Pohan, 2016. **Manajemen Perpajakan “ Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis”**. Edisi Revisi, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dewi Utari, dkk, 2014. **Manajemen Keuangan “Kajian Praktik dan Teori dalam Mengelola Keuangan Organisasi Perusahaan”**. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Erly Suandy, 2013. **Perencanaan Pajak**, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, 2010. **Pengatar Manajemen**, Edisi Pertama, , Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

H.M. Burhan Bungin, 2013. **Metodologi Penelitian Kuantitatif**, Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Hamid Darmadi, 2013. **Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial**, Bandung: Alfabeta.

Haerana, 2016. **Manajemen Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan; Teori dan Aplikasinya,** Yogyakarta: Media Akademi.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2011. **Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia**. Visi Media.

Hutagaol, John. 2007. **Perpajakan Isu-isu Kontemporer**, Jakarta: Graha Ilmu.

Irham Fahmi, 2014. **Manajemen Keuangan dan Pasar modal**, Jakarta: Mitra Wacana Media

Indriantoro,Nur dan Bambang Supomo. 2011, **”Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen”,** Edisi Pertama. BPFE,Yogyakarta

Kusnendi. 2005. **Analisis Jalur Konsep dan Aplikasi dengan Program SPSS dan Lisrel 8.** Bandung: UPI.

Mardiasmo, 2018. **Perpajakan, Edisi Revisi**. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Muhammad Zain, 2008. **Manajemen Perpajakan**. Edisi 3, Salemba Empat,

Jakarta.

R. Agus Sartono, 2010. **Manajemen Keuangan “Teori dan Aplikasi”**. Edisi 4, BPFE UGM, Yogyakarta.

Riduwan, 2010. **Metode dan Teknik Menyusun Tesis”**. Alfabeta, Bandung.

Rahayu S.K, 2013. **Perpajakan Indonesia**. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Suparmono, Treresia Woro Damayanti, 2010. **Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan**. Andi Offset, Yogyakarta.

Sonny Sumarsono, 2010. **Manajemen Keuangan Pemerintah**. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sumarsan, Thomas. 2017. **Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru** (Edisi 5). Jakarta : PT.Indeks.

Sugiyono, 2013. **Metode Penelitian Adminstrasi**, Alfabeta, Bandung.

Siti Resmi, 2013. **Perpajakan “teori & kasus”**, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010. **Perpajakan “Teori dan Teknis Perhitungan”** Graha Ilmu, Jakarta.

Suad Husnan, Enny Pudjiastuti, 2015. **Dasar-Dasar Manajemen Keuangan**, Edisi 7, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Widi Widodo, 2010. **Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak**. Bandung : Alfabeta

Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2009. **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta.

## Jurnal :

Awit Maulinda, Mienati Somya Lasnama, 2015. **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedangang Pengecer Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I”**. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Tahun XXV. No. 1, 1 April 2015.

Arnold Putra Christover, Sintje Rondonuwu, (2016). **“Pemahaman Ektensifikasi Wajib Pajak dan Intensifiaksi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak”**. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 1241-1253.

Dewi Kusuma Wardani, Erma Wati, (2018). **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap KepatuhanWajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen).** Jurnal Nominal / Volume VII Nomor 1 / Tahun 2018

Devy Yekti Palupi, Eva Herianti, (2017). **Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga).** Jurnal InFestasi *Vol. 13 No. 1 Juni 2017 Hal. 285 – 296*

Eupharasia Susy Suhendra (2010). **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”**. Jurnal Ekonomi Bisnis. No. 1, Volume 15, April 2010.

## Faesal Fazlurahman, (2016). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bandung

**Karees Tahun 2010-2015).** Jurnal Akuntansi Riset (ASET) Vol 5, No 2, 2016.

Fjeldstad dan Moore, (2008). **Paper: Panos London Illuminating Voices**

(2009).

## Hehakaya, Kezia Ayu. 2016. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifkasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang). UNIKOM.

M Arsyad. 2013. **Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan Dan Penagihan Aktif Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur**. Universitas Sumatera Utara.

Mistaul Amaliya, Alek Murtin, (2010). **Pengaruh Program Ekstensifikasi dan Intesifikasi Pajak, NPWP Serta Sunset Policy Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.** Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 11 No. 1, halaman 16-29, Januari 2010.

Maya Safira Dewi; Mirza Maulida, (2012). **Evaluasi Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.** Binus Business Review Vol. 3 No. 1 Mei 2012: 228-

245

Resti Mada Pertiwi, Suhadad, Kadarisman Hidayat, (2015). **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan”.** Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015|

Suyanto, Andri Setiawan, (2017) **“Pengaruh Kinerja Account Representative, *Self Assessment System*, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”**. Ekuilibrium : Jurnal Bidang Ilmu Ekonomi Vol.12 No.1 , 2017 Hal: 77-90.

Surjoputro, Djoko Slamet dan Junaedi Eko Widodo. 2004. **“Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan.” Dalam buku Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, ed. Robert Pakpahan dan toyomu Yuasa .** Jakarta: JICA.

Savitri, Enni. *2016.* ***The Effect of Tax Payer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable.*** *Procedia- Social and Behavioral Sciences 219 (2016) 682-687*

Jimenez, P., & Iyer, G.S., 2016*.* ***Tac Compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance, Advances in Accounting , incorporating Advances in International Accounting****,* [*http://dx.doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001*](http://dx.doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001)

## Diena Jukijanna. 2015. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Self Assessment System dan Implikasinya terhadap Administrasi Pajak (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)

*Saracoglu, Fatih., Caskurlu, Eren., Pursunlerli, Elif., (2018),* ***Taxes and Taxation Trends- Keystones of Performing a Proper Tax Policy Design for Tax Compliance: Does Perception of Tax Compliance Develop in Persons Who Are Not Tax Payers Yet****.,IntechOpen Volume: 10.5772/66, DOI: 10.5772/intechopen.70816*

*Aronmwan, Edosa Joshua, Imobhio, Ehichioya, Izedonmi, Famous (2015).,* ***Determinants of Personal Income Tax Compliance: Perception Of Nigerian Tax*** *PayersSSRN Electronic Journal, DOI: 10.2139/ssrn.2619855*

*Vu Van Huong, Ly Kim Cuong, (2018),* ***Does government support promote SME tax payments? New evidence from Vietnam****, Finance Research Letters, doi:https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.11.017*

*Vossler, Christian A., Gilpatric, Scott M., 2018.* ***Endogenous Audits, uncertainty, and taxpayer assistance services: Theory and experiments.*** *Journal of Public Economics 165 (2018) 217-229*

*Mohd Rizal Pahlil and Ahmad Fariq Mustapha, (2011****), Factors Affecting Tax Compliance Behaviour in self assessment system,*** *African Journal of Business Management Vol. 5 (33), pp. 12864-12872, 21 December 2011.DOI: 10.5897/AJBM11.1742.*

Mulugeta Terrefe (2016) ***A Close Scrutiny of Self-Assessment System and its Impact on the Tax Compliance Level of Taxpayers: The Case of Wolaita Zone***. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) (2016) Volume 20, No 1, pp 78-103

*Yayuk Ngesti Rahayu, Margono Setiawan, Eka Afnan Troena and Sudjatno, (2017),* ***The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance****; Journal of Accounting and Taxation, Vol. 9 (10), pp. 139-146, November 2017; DOI: 10.5897/JAT2017.0267*

*John Cullis, Philip Jones, Antonio Savoia (2012),* ***Social norms and tax compliance: Framing the decision to pay tax****; The Journal of Socio-Economics 41 (2012) 159-168;*

*Abubakari Abdul-Razak and Christopher Jwayire Adafula (2013),* ***Evaluating***

***taxpayer’s attitude and its influence on tax compliance decisions in Tamale****, Ghana; Journal of Accounting and Taxation Vol. 5(3), pp. 48-57, September 2013 DOI: 10.5897/JAT2013*

*Ingrid Wahl, Barbara Kastlunger, and Erich Kirchler, (2010),* ***Trust in Authorities and power to enforce tax compliance: An empirical***

***analysis of the “Slippery slope framework”****; Law and Policy, Vol. 32, No. 4, October 2010.*

*Gaetano Lisi (2015),* ***Tax Morale, Tax compliance and the optimal tax policy****; Journal of Economic Analysis and Policy Volume 45 (2015) 27-32. DOI:* 10.1016/j.eap.2014.12.004

## Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**

Undang Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang **Pajak Penghasilan.**

Undang Undang No.8 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang **Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.**

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**. Undang-Undang Rebublik Indenesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

## Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 /PMK.03/2015 Tentang **Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan**

Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak. 2001. No. SE-06/PJ.9/2001 Tahun 2001 *tentang* ***Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.***

## Majalah :

Majalah **Media Keuangan**, Kementrian Keuanga Republik Indonesia, Volume XIII / No. 124 / Januari 2018.